

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai kesesuaian Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan upah yang diterima para pekerja SPBU di Kabupaten Kudus, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Proses Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kudus

Proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus dimulai dengan membentuk Dewan Pengupahan yang terdiri dari Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kudus, tim BPS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja. Sebelum menentukan UMK, Dewan Pengupahan melakukan survei pasar terlebih dahulu untuk mengetahui nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Kudus.

Dalam survei tersebut diketahui bahwa nilai KHL Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.426.656.93. Selanjutnya Dewan Pengupahan menentukan UMK Kudus berdasarkan nilai KHL tersebut dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus melalui PDRB Per Kapita dan laju pertumbuhan PDRB. Dimana pada tahun 2015 PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus mencapai 102,15 juta Rupiah per tahun atau 8,51 juta Rupiah per bulan atas dasar harga berlaku, sedangkan laju pertumbuhan PDRB mencapai 84,92 trilyun Rupiah atas dasar harga berlaku. Sehingga Pada tahun 2016 nilai UMK Kabupaten Kudus ditentukan sebesar Rp. 1.608.200,- dengan pencapaian 112,7 % dari nilai KHL. Pencapaian nilai KHL ini diharapkan dapat mewujudkan peran UMK sebagai jaring pengaman bagi para pekerja/buruh.

2. Penerimaan Upah dan Kesesuaiannya terhadap Upah Minimum Kabupaten Kudus

Setiap perusahaan/industri di Kabupaten Kudus harus menjadikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus sebagai standar minimum dalam pembayaran gaji kepada karyawannya. Sebab UMK berperan sebagai jaring

pengaman agar pekerja/buruh dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Namun praktik penerimaan upah di kabupaten Kudus khususnya pada perusahaan SPBU masih belum sesuai dengan standar UMK Kudus. Hanya sebagian kecil saja perusahaan yang telah menetapkan Gaji/Upah diatas standar minimum atau UMK. Atau sebagian perusahaan ada yang melakukan taktik pengupahan dengan menyesuaikan UMK secara berkala atau pada bulan-bulan tertentu. Meski demikian, para pekerja merasa upah di bawah standar yang mereka terima masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun harus dengan pas-pasan dalam memanfaatkannya. Selama perusahaan dan para pekerja menyepakati besarnya nilai pengupahan ini, maka hal ini tidak menjadi masalah bagi keduanya. Sebab, dalam pengupahan harus ada kesepakatan secara bipartit antar pekerja dan pengusaha. Meski demikian, perusahaan akan lebih baik lagi jika dapat memberikan upah kepada pekerjanya sesuai dengan standar nilai minimum. Sebab dengan demikian nilai upah yang diterima para pekerja akan menjadi motivasi bagi pekerja, sehingga perusahaan mengalami peningkatan produktivitas yang tentunya diimbangi dengan keuntungan yang maksimal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dalam kesempatan ini penulis akan sedikit memberikan saran sebagai bahan masukan dalam hal pengupahan di Kabupaten Kudus. Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi Dinsosnakertrans

Pemerintah dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kudus yang mampu diterapkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai standar minimum dalam pengupahan, dan mampu berperan sebagai jaring pengaman bagi para pekerja dalam memenuhi Kebutuhan Hidup Layak.

2. Bagi SPBU di Kabupaten Kudus

Bagi perusahaan SPBU di Kabupaten Kudus diharapkan mampu memberikan hak finansial para pekerjanya untuk mendapatkan upah yang

sesuai dengan besarnya nilai UMK. Jika memang perusahaan belum mampu untuk memberikan upah yang sesuai dengan UMK, maka perusahaan sebaiknya mengajukan penangguhan kepada Pejabat Pengupahan. Perlu diketahui bahwa upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan hak yang semestinya akan menjadikan motivasi bagi pekerja agar mereka dapat meningkatkan kinerja mereka.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa agar dapat melakukan penelitian yang lebih baik dengan kajian yang berbeda. Supaya kajian pengupahan di Kabupaten Kudus dapat dijadikan pengetahuan ilmiah yang bermanfaat.

